

## ***Collaborative Governance Berbasis Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Desa Mandiri: Integrasi IDM dan SDGs Desa***

**Resky Amalia. P<sup>1\*</sup>, Nursafitra M<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas PEPABRI Makassar

<sup>2</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas PEPABRI Makassar

\*Corresponding author: [reskyamaliah04@gmail.com](mailto:reskyamaliah04@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

*Submitted:*

April 4, 2026

*Review:*

April 4, 2026

*Accepted:*

April 23, 2026

*Available online:*

April 30, 2026

*Article Citation (APA) :*

P, R., & M, N. (2026).

Collaborative Governance

Berbasis Kearifan Lokal

dalam Mewujudkan Desa

Mandiri: Integrasi IDM dan

SDGs Desa. *Jurnal*

*Publisitas*, 12(2), 118-128.

<https://doi.org/10.37858/jurnal.publisitas.v12i2.695>

<https://doi.org/10.37858/jurnal.publisitas.v12i2.695>

**DOI:** <https://doi.org/10.37858/jurnal.publisitas.v12i2.695>

[58/publisitas.v12i2.695](https://doi.org/10.37858/jurnal.publisitas.v12i2.695)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model collaborative governance berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan desa mandiri melalui integrasi Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya capaian pembangunan desa di Indonesia sejak implementasi kebijakan dana desa, namun belum merata karena sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang dan maju. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian secara berkelanjutan, terutama dalam mengoptimalkan kolaborasi antaraktor dan pemanfaatan kearifan lokal. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan collaborative governance, tetapi implementasinya masih cenderung parsial dan belum mampu mengintegrasikan potensi lokal secara optimal. Selain itu, integrasi antara IDM sebagai indikator capaian pembangunan dan SDGs Desa sebagai arah pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya dijadikan kerangka terpadu dalam praktik pembangunan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Wajo. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dengan mengacu pada kerangka collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu kepemimpinan kolektif, insentif material dan nonmaterial, interdependensi antaraktor, serta kemampuan menghadapi ketidakpastian. Kepemimpinan yang melibatkan aktor formal dan informal mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sementara insentif dan nilai kearifan lokal seperti gotong royong menjadi pendorong keterlibatan berkelanjutan. Sinergi antaraktor memperkuat kapasitas kolektif dalam pembangunan desa meskipun masih terdapat kendala pada aspek SDM, anggaran, dan koordinasi. Penelitian ini menghasilkan model collaborative governance integratif sebagai strategi percepatan terwujudnya desa mandiri yang berkelanjutan. Pemanfaatan kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah juga harus terus dipertahankan sebagai modal sosial utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi kajian pada berbagai karakteristik desa agar diperoleh model collaborative governance yang lebih umum.

**Kata Kunci:** collaborative governance; desa mandiri; kearifan lokal; IDM; SDGs Desa

### **ABSTRACT**

*This study aims to develop a collaborative governance model based on local wisdom to realize independent villages through the integration of the Village Development Index (IDM) and the Village SDGs. This research is motivated by the increasing achievements of village development in Indonesia since the implementation of the village fund policy, but this is not evenly distributed because most villages are still in the developing and developed categories. This condition indicates that the village*

*development process still faces challenges in increasing independence in a sustainable manner, especially in optimizing collaboration between actors and utilizing local wisdom. Various previous studies have examined village development through participatory approaches and collaborative governance, but their implementation still tends to be partial and has not been able to optimally integrate local potential. Furthermore, the integration between the IDM as an indicator of development achievements and the Village SDGs as a direction for sustainable development has not been fully integrated into an integrated framework in village development practices. The study used a qualitative approach with a case study design in Wajo Regency. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using an interactive analysis model with reference to the collaborative governance framework. The results show that the success of collaboration is determined by four main factors: collective leadership, material and non-material incentives, interdependence between actors, and the ability to face uncertainty. Leadership involving formal and informal actors can increase community trust and participation, while incentives and local wisdom values, such as mutual cooperation, serve as drivers for sustained engagement. Synergy between actors strengthens collective capacity in village development, despite persistent challenges in human resources, budgeting, and coordination. This research yields an integrative collaborative governance model as a strategy to accelerate the realization of sustainable, independent villages. The use of local wisdom, such as mutual cooperation and deliberation, must also be maintained as the primary social capital in supporting sustainable village development. Future research is recommended to expand the study locations to include various village characteristics to obtain a more general collaborative governance model.*

**Keywords:** *collaborative governance; independent villages; local wisdom; IDM; Village SDGs*

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak implementasi kebijakan dana desa. Kebijakan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pembangunan berbasis kewenangan lokal dan kearifan masyarakat, serta didukung melalui penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah meningkatnya jumlah desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, yang mencakup Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Amalia P., 2025). Meskipun demikian, capaian tersebut belum merata, di mana sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang dan maju. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan (Warda et al., 2018).

Kesenjangan penelitian sebelumnya terletak pada belum terintegrasinya secara komprehensif antara pendekatan collaborative governance, kearifan lokal, serta penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa dalam satu kerangka pembangunan desa yang utuh. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji collaborative governance hanya pada aspek kelembagaan dan koordinasi antaraktor, tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar penguatan partisipasi masyarakat. Akibatnya, belum tersedia model pembangunan desa yang mampu menghubungkan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi secara kolaboratif berbasis potensi lokal. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini untuk mengembangkan model collaborative governance berbasis kearifan lokal yang terintegrasi dengan IDM dan SDGs Desa dalam mewujudkan desa mandiri secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pembangunan desa dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, serta collaborative governance (Fanani & Ibrahim, 2018). Hasil penelitian terkait program simpan pinjam perempuan memperlihatkan bahwa inovasi kebijakan di tingkat lokal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan memberdayakan komunitas, jika pendekatannya bersifat kolaboratif dan kontekstual sesuai kondisi lokal (Amalia P. et al., 2021). Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa proses kolaborasi multi-aktor dalam implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, meskipun beberapa indikator formal, seperti pertemuan koordinasi berkala, telah terpenuhi (Kesumaningsih, 2023). Collaborative governance dipandang sebagai pendekatan yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam proses pembangunan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance dalam pembangunan desa masih cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi potensi lokal secara optimal (Kamaluddin, 2025).

Di sisi lain, studi mengenai pembangunan desa juga telah mengarah pada integrasi SDGs Desa sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan, serta penggunaan IDM sebagai alat ukur capaian pembangunan desa (Syahdan, 2024). Meskipun demikian, keterkaitan antara collaborative governance, kearifan lokal, serta integrasi antara IDM dan SDGs Desa masih belum banyak dikaji secara komprehensif. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan baik secara empiris maupun teoritis (Kasmawati, 2025). Secara empiris, pembangunan desa masih menunjukkan ketimpangan capaian kemandirian antar wilayah. Secara teoritis, belum banyak penelitian yang mengembangkan model collaborative governance yang secara spesifik mengintegrasikan kearifan lokal sebagai elemen utama dalam pembangunan desa (Garvera et al., 2021). Selain itu, secara normatif, integrasi antara arah pembangunan (SDGs Desa) dan alat ukur capaian (IDM) belum sepenuhnya dijadikan sebagai satu kesatuan dalam kerangka pembangunan desa (Phasa & Andriyus, 2022). Meskipun berbagai studi telah membahas pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan collaborative governance, masih terdapat kesenjangan yang signifikan baik secara empiris maupun teoritis. Secara empiris, implementasi collaborative governance di tingkat desa masih belum optimal dan cenderung parsial, serta belum mampu mengakomodasi potensi dan kearifan lokal secara maksimal dalam proses pembangunan (Hanip et al., 2025). Sementara itu, secara teoritis, penelitian yang mengkaji integrasi antara collaborative governance, kearifan lokal, serta keterkaitan antara IDM dan SDGs Desa masih sangat terbatas dan belum dikembangkan dalam suatu model yang komprehensif. Selain itu, terdapat kesenjangan normatif di mana IDM sebagai alat ukur capaian pembangunan dan SDGs Desa sebagai arah pembangunan belum sepenuhnya diintegrasikan dalam praktik kebijakan desa (Rifka, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan model collaborative governance berbasis kearifan lokal yang mampu menjembatani aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan desa secara terpadu dan berkelanjutan (Febrian, 2016).

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pengembangan model collaborative governance berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan IDM sebagai indikator capaian dan SDGs Desa sebagai arah pembangunan. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pendekatan pembangunan desa yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan model collaborative governance berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan desa mandiri melalui integrasi IDM dan SDGs Desa (Dhiyaulhaq, 2023).

Kebaruan lainnya dalam penelitian ini terletak pada pengembangan model collaborative governance yang secara eksplisit mengintegrasikan kearifan lokal sebagai elemen utama dalam proses pembangunan desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan kolaborasi aktor hanya pada aspek kelembagaan dan procedural (Prawestari et al., 2021), penelitian ini menekankan pentingnya nilai-nilai lokal, norma sosial, serta praktik budaya sebagai fondasi dalam membangun sinergi antar-aktor. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan integrasi yang sistematis antara Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan dengan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan berkelanjutan (Sri Ilham Nasution et al., 2026). Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional karena mampu menghubungkan dimensi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa dalam satu kerangka kolaboratif berbasis kearifan lokal (Kayupa et al., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi collaborative governance berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan desa mandiri (Iin Salsabila et al., 2025). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, khususnya terkait interaksi antaraktor dalam proses kolaborasi pembangunan desa (Wulan et al., 2025). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kabupaten Wajo, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki dinamika pembangunan desa yang beragam serta potensi kearifan lokal yang masih terpelihara dalam praktik sosial masyarakat. Selain itu, variasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah ini menjadi relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan desa mandiri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yang meliputi pemerintah desa, perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pembangunan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan pemerintah, serta data terkait capaian IDM dan SDGs Desa (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait praktik collaborative governance, peran aktor, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam pembangunan desa. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi empiris di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara sistematis sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi hasil penelitian. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya terkait praktik kolaborasi antaraktor dalam pembangunan desa. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola hubungan, peran aktor, serta dinamika yang terjadi dalam proses kolaborasi. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan kunci seperti pemerintah desa, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat yang dipilih secara purposive. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta data terkait IDM dan SDGs Desa.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada kerangka collaborative governance untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, peran aktor, serta kontribusi kearifan lokal dalam mewujudkan desa mandiri. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka Collaborative Governance, khususnya aspek-aspek yang mempengaruhi proses kolaborasi, serta dikaitkan dengan kearifan lokal, capaian Indeks Desa Membangun (IDM), dan arah pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs Desa). Dalam hal ini, penelitian menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Emerson et al. yang menekankan pada faktor-faktor pendorong (drivers) dalam proses kolaborasi, meliputi kepemimpinan, insentif, interdependensi, dan ketidakpastian. Sementara itu, konsep collaborative governance dari Ansell dan Gash digunakan sebagai landasan konseptual dalam memahami proses kolaborasi antaraktor secara umum. Proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif) dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan kesesuaian serta mengidentifikasi pola-pola temuan yang konsisten. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk melihat bagaimana faktor-faktor pendorong collaborative governance berkontribusi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri melalui integrasi antara peran aktor, nilai-nilai kearifan lokal, serta indikator pembangunan desa. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data serta teknik pengumpulan data yang berbeda, sehingga diperoleh temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam pembangunan desa menunjukkan dinamika yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling terkait. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka Emerson et al. yang menekankan pada faktor-faktor pendorong (drivers) dalam proses kolaborasi. Temuan penelitian selanjutnya diuraikan berdasarkan empat aspek utama, yaitu kepemimpinan, insentif, interdependensi, dan ketidakpastian, yang dianalisis dalam konteks pembangunan desa menuju desa mandiri.

### **4.1 Leadership dalam Collaborative Governance Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan memiliki peran strategis dalam mendorong pelaksanaan collaborative governance dalam pembangunan desa. Kepemimpinan dalam konteks desa tidak hanya bersifat formal yang dijalankan oleh kepala desa, tetapi juga melibatkan aktor informal seperti tokoh masyarakat dan tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat dalam struktur sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, ditemukan bahwa kepala desa berperan sebagai penggerak utama dalam mengoordinasikan program pembangunan, sementara tokoh masyarakat berperan dalam membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam konteks desa bersifat kolektif dan tidak semata-mata hierarkis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala desa berperan menginisiasi dan mengarahkan program, namun keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada dukungan tokoh masyarakat yang dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga. Selain itu, kepemimpinan

berbasis kearifan lokal seperti nilai gotong royong dan musyawarah menjadi faktor penting dalam memperkuat hubungan antaraktor. Praktik ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara sukarela.

Dalam kaitannya dengan Indeks Desa Membangun (IDM), data menunjukkan bahwa desa mengalami perubahan status dari desa berkembang menjadi desa Mandiri sebagian besar dalam kurun waktu 2 Tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian. Selain itu, kepemimpinan yang adaptif juga berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs Desa).

#### **4.2 Incentives dalam Mendorong Partisipasi Kolaboratif**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa insentif menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong keterlibatan berbagai aktor dalam collaborative governance. Insentif yang dimaksud tidak hanya bersifat material seperti dukungan anggaran dan program, tetapi juga non-material seperti peningkatan kapasitas, akses terhadap informasi, serta pengakuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi ketika mereka merasakan manfaat langsung dari program yang dijalankan, baik dalam bentuk peningkatan ekonomi maupun penguatan kapasitas sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi apabila kegiatan memberikan manfaat langsung seperti peningkatan pendapatan dan keterampilan, serta didukung oleh adanya penghargaan dari pemerintah desa dan rasa kebersamaan. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan informan juga menegaskan bahwa insentif dalam konteks collaborative governance tidak hanya terbatas pada dukungan anggaran, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti peningkatan kapasitas dan akses terhadap informasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan bahwa Masyarakat lebih termotivasi berpartisipasi ketika insentif tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga kesempatan belajar dan akses informasi yang memberikan manfaat langsung. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mendorong partisipasi masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh besaran insentif material, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat yang bersifat pengembangan diri dan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, insentif non-material menjadi faktor strategis dalam memperkuat keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan dalam proses pembangunan desa. Lebih lanjut, dalam konteks lokal desa, bentuk insentif non-material tersebut juga terinternalisasi dalam nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti kebersamaan dan solidaritas sosial menjadi insentif intrinsik yang mendorong partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, seperti gotong royong dan musyawarah, menunjukkan bahwa insentif sosial memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan insentif material.

Data menunjukkan bahwa terdapat sejumlah program atau kegiatan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, terutama pada bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dukungan anggaran desa juga menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan kolaborasi. Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran desa untuk program terkait berada pada kisaran lebih dari satu miliar rupiah. Sebagai contoh, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, Desa Patila di Kabupaten Wajo memiliki total APBDes sebesar Rp 1.443.398.900 dengan dukungan Dana Desa sebesar Rp 806.840.000 (Sumber:IDM Kemendesra, 2024). Meskipun demikian, alokasi tersebut dinilai

masih perlu dioptimalkan dalam mendukung kolaborasi antaraktor, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Selain itu, masih terdapat kendala dalam aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM), komunikasi antaraktor, serta koordinasi kelembagaan, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, insentif dalam collaborative governance tidak hanya berfungsi sebagai pendorong partisipasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan desa.

### **4.3 Interdependence Antar aktor dalam Pembangunan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interdependensi antaraktor merupakan elemen penting dalam pelaksanaan collaborative governance. Pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal memiliki hubungan yang saling bergantung dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana utama dalam kegiatan pembangunan. Di sisi lain, pihak eksternal seperti pendamping desa atau lembaga terkait berperan dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan kapasitas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah desa berperan mengarahkan dan memfasilitasi program, sementara pelaksanaan di lapangan didominasi oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari pendamping desa sesuai peran masing-masing.

Interdependensi ini juga diperkuat oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa. Praktik ini terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Data menunjukkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya 13 kelompok masyarakat/kelembagaan desa yang terlibat dalam proses pembangunan, meliputi pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, kelompok tani, kelompok pemuda (karang taruna), kader posyandu, kelompok perempuan, remaja masjid, kelompok olahraga, serta lembaga kerja sama desa. Temuan ini diperoleh dari hasil penelitian pada Desa Wele di Kabupaten Wajo, yang menunjukkan bahwa struktur kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga membentuk jaringan kolaboratif yang saling terhubung dalam proses pembangunan desa. Lebih lanjut, keberagaman aktor tersebut mencerminkan adanya interdependensi fungsional, di mana setiap kelembagaan memiliki peran, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam perspektif collaborative governance, kondisi ini sejalan dengan konsep interdependence yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi, bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh tingkat ketergantungan antaraktor dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keterlibatan berbagai kelembagaan di Desa Wele tidak hanya menunjukkan tingginya partisipasi, tetapi juga merefleksikan terbentuknya capacity for joint action, yaitu kemampuan kolektif antaraktor dalam merancang dan melaksanakan pembangunan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antaraktor juga tercermin dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi produktif berbasis UMKM dan kepemudaan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, karang taruna, dan masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan seperti festival UMKM yang melibatkan ratusan kelompok masyarakat dan mendorong partisipasi luas dalam pembangunan ekonomi lokal.

Selain itu, sinergi antaraktor juga tercermin dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang didukung melalui alokasi APBDes. Dukungan anggaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme penggerak kolaborasi antaraktor, yang memungkinkan terjadinya integrasi peran antara pemerintah desa, masyarakat, dan kelembagaan lokal dalam proses

pembangunan. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan capaian Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada dimensi sosial dan ekonomi, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari semakin kuatnya kapasitas kelembagaan lokal, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis komunitas yang didukung oleh kolaborasi antaraktor di tingkat desa.

**4.4 Uncertainty dalam Proses Collaborative Governance**

Meskipun collaborative governance memberikan dampak positif, penelitian ini menemukan adanya berbagai tantangan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas kelembagaan, juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan proses kolaborasi. Dinamika sosial serta perubahan kebijakan juga turut mempengaruhi keberlanjutan program pembangunan desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat belum maksimal karena sebagian warga belum memahami program, serta adanya keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan desa.

Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran Desa untuk program terkait berada dalam kisaran ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah per tahun, sebagaimana merujuk pada kebijakan Dana Desa secara nasional yang rata-rata mencapai sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar per desa per tahun. Meskipun demikian, alokasi tersebut dinilai masih perlu dioptimalkan dalam mendukung kolaborasi antaraktor, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Selain itu, masih terdapat kendala dalam aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM), komunikasi antaraktor, serta koordinasi kelembagaan, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, collaborative governance mampu menjadi mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian tersebut melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi antaraktor. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga terbukti menjadi strategi adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai kendala, collaborative governance tetap memiliki potensi besar dalam mendukung terwujudnya desa mandiri, terutama jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat, insentif yang tepat, serta hubungan interdependensi yang solid.

**4.5 Collaborative Governance Berbasis Kearifan Lokal**

Tabel 1. Collaborative Governance Berbasis Kearifan Lokal

Aspek (Driver)	Temuan Utama	Peran Kearifan Lokal	Dampak terhadap Desa Mandiri
Leadership (Kepemimpinan)	Kepemimpinan bersifat kolektif (kepala desa dan tokoh masyarakat)	Nilai musyawarah dan gotong royong memperkuat kepercayaan	Meningkatkan partisipasi dan percepatan perubahan status desa menjadi mandiri
Incentives (Insentif)	Insentif material & non-material mendorong partisipasi	Solidaritas sosial dan kebersamaan sebagai insentif intrinsik	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan program
Interdependence	Antaraktor saling	Gotong royong	Memperkuat kapasitas

(Ketergantungan)	bergantung (pemerintah, masyarakat, pendamping)	memperkuat kerja sama	kolektif dan kolaborasi pembangunan desa
Uncertainty (Ketidakpastian)	Keterbatasan SDM, anggaran, dan pemahaman masyarakat	Nilai lokal menjadi strategi adaptif menghadapi perubahan	Kolaborasi membantu mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas program

Sumber : Diolah Penulis, Tahun 2026

*Collaborative Governance* berbasis kearifan lokal dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh empat driver utama, yaitu kepemimpinan, insentif, interdependensi, dan ketidakpastian. Pada aspek kepemimpinan, pola kepemimpinan kolektif yang melibatkan Kepala Desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak hanya bertumpu pada aktor formal, tetapi juga pada aktor informal yang memiliki legitimasi sosial. Nilai musyawarah dan gotong royong sebagai kearifan lokal berperan memperkuat kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat sehingga mempercepat perubahan status Desa menuju Desa Mandiri. Pada aspek insentif, keterlibatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh insentif material, tetapi juga oleh insentif non-material yang bersumber dari solidaritas sosial dan kebersamaan. Kearifan lokal menjadi faktor intrinsik yang memperkuat motivasi kolektif masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat serta keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif. Selanjutnya, aspek interdependensi menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara Pemerintah Desa, masyarakat, dan pendamping. Nilai gotong royong memperkuat kerja sama antaraktor sehingga meningkatkan kapasitas kolektif dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Kolaborasi yang terbangun secara sinergis mampu memperkuat kelembagaan desa serta mendukung pencapaian desa mandiri. Sementara itu, pada aspek ketidakpastian, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan pemahaman masyarakat menjadi tantangan dalam pembangunan Desa. Namun demikian, nilai-nilai lokal berfungsi sebagai strategi adaptif dalam menghadapi perubahan, sehingga kolaborasi antaraktor mampu mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas program. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam pembangunan Desa sangat dipengaruhi oleh integrasi nilai kearifan lokal dalam setiap driver kolaborasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam pembangunan Desa sangat ditentukan oleh empat faktor utama. Pertama, kepemimpinan yang bersifat kolektif melibatkan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat berperan strategis dalam menggerakkan partisipasi dan membangun kepercayaan. Kedua, insentif, baik material maupun non-material, terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga, interdependensi antar aktor menciptakan sinergi yang memperkuat kapasitas kolektif dalam pelaksanaan pembangunan. Keempat, meskipun terdapat ketidakpastian seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan pemahaman masyarakat, pendekatan kolaboratif berbasis kearifan lokal mampu menjadi mekanisme adaptif dalam mengatasinya.

Secara keseluruhan, collaborative governance berkontribusi signifikan terhadap peningkatan status Desa dan pencapaian kemandirian. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa memerlukan penguatan kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelembagaan lokal. Pemberian insentif material dan non-material, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi antaraktor perlu dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah menjadi modal sosial penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa secara mandiri.

Pemerintah desa perlu memperkuat kepemimpinan kolaboratif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kelembagaan lokal, serta mengoptimalkan insentif material dan non-material seperti pelatihan, akses informasi, dan pengakuan sosial untuk meningkatkan partisipasi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antaraktor, transparansi, dan sosialisasi program perlu diprioritaskan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif. Kearifan lokal seperti gotong royong dan musyawarah juga harus dipertahankan sebagai modal sosial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi kajian, menggunakan pendekatan mixed methods, serta melakukan studi longitudinal guna mengukur keberlanjutan dampak dan memperkuat model collaborative governance dalam pembangunan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia P. (2025). Tata Kelola Kolaboratif Melalui Bumdes Dalam Pencapaian Desa Mandiri Di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. 5(Vdi), 25229–25235.
- Amalia P., R., Agustang, A., Idhan, A. M., & Suryadi. (2021). Implementasi Inovasi Kebijakan Program (Spp) Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Publik, 8(2), 306–323.
- Dhiyaulhaq, F. (2023). Politik Tata Kelola Bumdes Studi Kasus Kerjasama Pengelolaan Bumdes Gerbanglentera Pemerintah Desa Lerep Kecamatan Ungaranbarat Kabupaten Semarang.
- Fanani, A. F., & Ibrahim, S. (2018). Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa. Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 3(2), 1–18.  
<https://doi.org/10.36636/Dialektika.V3i2.148>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance In The Development of Rural Areas (Review Of The Draft And Regulation).” Jurnal Kajian Pemerintah Li (2016): 200–208.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(3), 502–513.
- Hanip, M., Kristianto, A., Khoirurizka, M. A., Nanda, D. B., Kusumaningrum, A., Yudhistira, P., & Ardhiarisca, O. (2025). Eksplorasi Implementasi Good Governance Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi, 2(4), 92–111.  
<https://doi.org/10.62383/Studi.V2i4.756>
- lin Salsabila, Dinda Meiliani, Sabila Maharani, & Reza Noprial Lubis. (2025). Desain Penelitian Studi Kasus. Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika, 3(3), 245–254. <https://doi.org/10.61132/Arjuna.V3i3.1937>

- Kamaluddin, T. I. (2025). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 22(1), 64–71.
- Kasmawati. (2025). Model Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Berbadan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perusahaan Model Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Berbadan.
- Kayupa, O. O., Guampe, F., Hengkeng, J., & Balo, M. J. (2025). Tantangan Dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa Di Indonesia. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 187–199.  
<https://doi.org/10.35912/Simo.V6i1.3483>
- Kesumaningsih, I., & Aigistina; Amalia, R. (2023). Collaborative Process For Preventing Violence Against Women And Children In Makassar City. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 79–92.
- Phasa, N. P., & Andriyus. (2022). Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Di Desa Yungyang, Kecam. Braz Dent J., 33(1), 1–12.
- Prawestari, L., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Publik, J. A., Studi, P., & Administrasi, I. (2021). Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana Di Indonesia.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). Desa Berkelanjutan (Implementasi Sdgs Dalam Pembangunan Desa Di Indonesia) (Vol. 2).
- Sri Ilham Nasution, Khomsahrial Romli, Muhammad Mawardi J, & Fauzi Nadziiran Haq. (2026). Local Wisdom As Cultural Pedagogy: Membangun Identitas Dan Ketahanan Sosial Peserta Didik. *Risoma : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 01–12.  
<https://doi.org/10.62383/Risoma.V4i1.1398>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In Bandung: Alfabeta.
- Syahdan. (2024). Berbasis Web Di Dinas Pemberdayaan. *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 35 No.
- Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbani, R., & Izzati, R. Al. (2018). Dinamika Ketimpangan Dan Penghidupan Di Pedesaan Indonesia. In The Smeru Research Institute (Issue November 2019). [http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/Wp\\_Tifa-1\\_2019-11-13\\_Notrack.pdf](http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/Wp_Tifa-1_2019-11-13_Notrack.pdf)
- Wulan, N., Palupi, I., Ummah, S. R., & Larasati, P. (2025). Konsep Dan Praktik Metode Kualitatif Untuk Penelitian Sosial. *Jurnal Riset Humaniora Dan Pendidikan*, 188–198.